

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Mahendra, 2013). Berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan membutuhkan informasi dari laporan keuangan pemerintah yang disajikan secara komprehensif. Salah satu ciri-ciri Laporan keuangan yang baik yaitu menerapkan transparansi pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan yang bagus mencerminkan pemerintahan yang bagus juga. Dengan adanya transparansi pelaporan keuangan, semua kalangan yang membutuhkan laporan keuangan di pemerintahan dapat mengetahuinya.

Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Transparansi pelaporan keuangan pemerintah dapat menjadikan masyarakat mengetahui keadaan di pemerintahan. Hal ini diharapkan oleh masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap

masyarakat, karena pada hakekatnya uang yang dikelola pemerintah itu bersumber dari rakyat sendiri, sehingga sangat wajar jika masyarakat menginginkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, dengan adanya transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah menjadikan masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung tentang tata kelola keuangan di pemerintahan daerah (pemda).

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Mahendra, 2013). Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan transparansi pelaporan keuangan yang didorong oleh adanya kapasitas sumber daya manusia, ketidakpastian lingkungan, jumlah belanja, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Ridha dan Basuki (2012) dalam Mahendra (2013), transparansi dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu,

butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Kapasitas sumber daya manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggung jawab tersebut diuraikan di dalam *job description* (Primayana dan kawan-kawan, 2014). Menurut Indriasari dan Naharto (2008) dalam Primayana dkk (2014), kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu untuk mengatur suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah (LKD) yang berkualitas. Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh lembaga atau organisasi, oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berubah-ubah. Laporan keuangan dari SKPD lain juga akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan akan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan menjadi faktor dalam penyajian dan pengungkapan transparansi pelaporan keuangan. Menurut Ridha dan Basuki (2012),

ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak padunya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakteraturan regulasi atas belanja yang dikeluarkan menjadi faktor penting yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dana belanja tidak dapat dikontrol dengan baik dan dapat menyebabkan kecurangan atas belanja seperti korupsi (Darmastuti dan Setyaningrum, 2009). Belanja adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kebutuhan Pemerintah itu sendiri dan untuk kelangsungan kegiatan di wilayah pemerintahan tersebut. Jumlah belanja yang dikelola oleh pemda tidak terlalu diperhatikan dalam mengungkapkan laporan keuangan. Namun kebanyakan dalam Pemerintahan belanja menjadi masalah pengelolaan keuangan.

Menurut Winidiyaningrum dan Rahmawati (2010), Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) yang berjudul “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini merubah tiga variabel menjadi empat variabel independen yaitu mengganti variabel tekanan eksternal dan komitmen manajemen menjadi kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan jumlah belanja yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia. Peneliti mengambil variabel tersebut mengacu pada saran dari peneliti sebelumnya untuk kembali diteliti dalam variabel berbeda. Peneliti ingin mengetahui apakah hasil dari penelitian ini akan tetap signifikan jika dua variabel bebas diganti. Sedangkan dua variabel terikat yang lain dan variabel terikat tetap sama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
3. Apakah jumlah belanja berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan emda.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah jumlah belanja berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan Pemda, khususnya organisasi pemerintah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi SKPD guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 - d. Kontribusi praktik berupa masukan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.
2. Teoritis
- a. Memberi bukti empiris mengenai pengaruh mengenai kapasitas sumber daya manusia, ketidakpastian lingkungan, jumlah anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.
 - b. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, ketidakpastian lingkungan, jumlah anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas penyajian dan pengungkapan transparansi laporan keuangan pemda.